

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka pembangunan nasional di Indonesia, pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk mengembangkan daerahnya dan menyeimbangkan dengan laju pertumbuhan daerah sesuai dengan prioritas dan meningkatkan kemampuan potensi daerah masing-masing. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat bersama-sama mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru yang merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Lincoln Arsyad, 1997).

Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan peluang yang besar bagi daerah untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki agar dapat memberikan hasil yang optimal. Setiap pemerintah daerah berupaya keras meningkatkan perekonomian daerahnya sendiri termasuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Disamping pengelolaan terhadap sumber PAD yang sudah ada perlu ditingkatkan dan daerah juga harus selalu kreatif dan inovatif dalam mencari dan mengembangkan potensi sumber-sumber PAD sehingga semakin

banyak memiliki sumber pendapatan yang akan dipergunakan dalam pembangunan daerahnya (Nasrul Qadarochman,2010).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber penerimaan daerah terdiri dari : (a) Pendapatan Asli Daerah (b) Dana Perimbangan (c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Sebaliknya, semakin rendah penerimaan PAD suatu daerah maka semakin tinggi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Ini dikarenakan PAD merupakan sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah itu sendiri.

Secara geografis, Daerah Istimewa Yogyakarta terletak $7^{\circ}33'-8^{\circ}12'$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}00'-110^{\circ}50'$ Bujur Timur, dengan luas 3.185,80 km². Secara administratif terdiri dari 1 Kota dan 4 Kabupaten, 78 Kecamatan dan 438 Kelurahan/Desa, yaitu :

Tabel 1.1
Kondisi Geografis DIY

Kabupaten/Kota	Luas area	Kecamatan	Kelurahan/Desa
Kota Yogyakarta	32,50 km ³	14 kecamatan	45 kel
Kab. Bantul	506,85 km ³	17 kecamatan	75 desa
Kab. Kulonprogo	586,27 km ³	12 kecamatan	88 desa
Kab. Gunungkidul	1.485,36 km ³	18 kecamatan	144 desa
Kab. Sleman	574,82 km ³	17 kecamatan	86 desa
DIY	3.185,80 km ³	78 kecamatan	438 kelurahan/desa

Sumber: Statistik Indonesia D.I Yogyakarta

Dalam pembangunan daerah, sektor pariwisata memegang peranan penting dan dapat menjadi tolak ukur untuk meningkatkan pembangunan sektor-sektor yang lain secara bertahap. Hal ini dapat dilihat dari dampak positif yang diberikan industri pariwisata dalam perekonomian nasional. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah sub sektor pariwisata di DIY tahun 2014 menunjukkan Kota Yogyakarta pada tahun 2014 sebesar 49,0%, Kabupaten Sleman sebesar 35,8%, Kabupaten Bantul sebesar 6,8%, Kabupaten Kulonprogo sebesar 1,1% dan Kabupaten Gunungkidul sebesar 7,3%, sehingga total sebesar 100% PAD di DIY berasal dari sektor pariwisata (Statistik Kepariwisata,2014). Hal ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata menjadi peranan penting bagi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Dengan adanya pariwisata dan banyaknya obyek-obyek wisata akan berdampak baik untuk nasional maupun daerah yaitu dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah baik dari segi lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi. Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikenal sebagai kota perjuangan, kota pendidikan, pusat kebudayaan dan menjadi salah satu tujuan wisatawan nusantara dan mancanegara yang memiliki potensi alam yang melimpah. Dari beberapa sektor-sektor yang dikembangkan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bisa digali dan terus dikembangkan. Dalam tabel 1.2 dapat dilihat perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 1.2
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah per Kabupaten/Kota di DIY
Tahun 2011-2014 dalam jutaan

Kabupaten/Kota	Tahun			
	2011	2012	2013	2014
Kota Yogyakarta	202.260.820	241.190.745	304.797.499	470.634.760
Kab. Sleman	203.416.683	220.367.231	298.406.947	573.337.599
Kab. Bantul	106.885.124	121.593.862	170.006.171	224.197.864
Kab. Kulonprogo	49.588.455	54.293.141	64.750.332	158.800.563
Kab. Gunungkidul	41.985.405	55.600.362	66.710.860	159.304.338

Sumber: BPS D.I Yogyakarta

Dilihat dari tabel 1.2 diatas perkembangan Jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Yogyakarta dari tahun 2011-2014 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kota Yogyakarta pada tahun 2011 memberikan sumbangan PAD sebesar 202.260.820 juta dan meningkat di tahun 2014 sebesar 470.634.760 juta. Kabupaten Sleman pada tahun 2011 memberikan sumbangan PAD sebesar 203.416.683 juta dan meningkat pada tahun 2014 sebesar 573.337.599 juta. Kabupaten Bantul pada tahun 2011 memberikan sumbangan PAD sebesar 106.885.124 juta dan meningkat di tahun 2014 sebesar 224.197.864 juta. Kemudian disusul dengan 2 Kabupaten lainnya yaitu Kabupaten kulonprogo memberikan sumbangan PAD pada tahun 2011 sebesar 49.588.455 juta dan meningkat pada tahun 2014 sebesar 158.800.563 juta. Dan terakhir Kabupaten Gunungkidul memberikan sumbangan PAD pada tahun 2011 sebesar 41.985.405 juta dan meningkat pada tahun 2014 sebesar 159.304.338 juta.

Menurut Mardiasmo (2002:132), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil

perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai pendapatan utama dan sebagai alat pengukur keuangan daerah. Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan dan membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam menyelidiki kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta yang berupa barang-barang publik. Pada tabel 1.3 dibawah ini merupakan perkembangan pajak daerah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 1.3
Perkembangan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta
Tahun 2011-2014 dalam jutaan

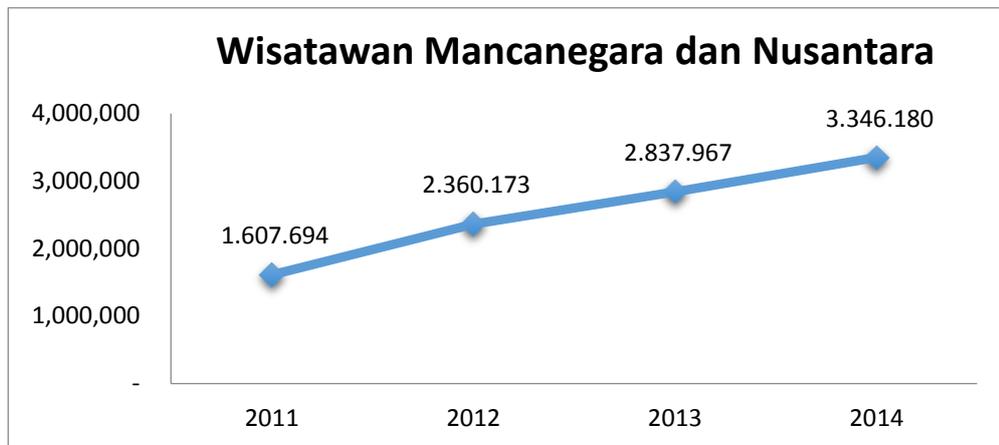
Tahun	Kabupaten/Kota				
	Kota	Sleman	Bantul	Kulonprogo	Gunungkidul
2011	120.457.515	142.698.407	35.068.591	5.853.809	8.129.852
2012	208.812.089	177.835.870	51.768.352	8.448.298	10.728.490
2013	230.465.805	281.385.141	83.232.017	8.701.734	12.350.676
2014	253.996.307	326.033.995	99.558.470	21.171.577	28.477.674

Sumber: DPPKA Kabupaten/Kota

Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 4 Kabupaten dan 1 Kota yang terdiri dari Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul dan Kota Yogyakarta. Perkembangan pajak daerah Kabupaten/Kota setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dilihat pada tahun 2011 di Kota Yogyakarta penerimaan pajak daerah sebesar 120.457.515 juta dan meningkat di tahun 2014 sebesar 253.996.307 juta. Kabupaten Sleman tahun 2011 penerimaan pajak daerah sebesar 142.698.407 juta dan meningkat

di tahun 2014 sebesar 326.033.995 juta. Kabupaten Bantul 35.068.591 juta dan meningkat di tahun 2014 sebesar 99.558.470 juta. Kabupaten Kulonprogo tahun 2011 penerimaan pajak daerah sebesar 5.853.809 juta dan meningkat pada tahun 2014 sebesar 21.171.577 juta. Kabupaten Gunungkidul tahun 2011 penerimaan pajak daerah sebesar 8.129.852 juta dan meningkat di tahun 2014 sebesar 28.477.674 juta. Dari 4 Kabupaten yang berada di Yogyakarta, Kabupaten Sleman yang memberikan penerimaan pajak daerah terbesar dan terendah di Kabupaten Kulonprogo. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah yang memiliki kontribusi yang sangat penting dalam membiayai pemerintah dan pembangunan daerah karena pajak daerah bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan penerimaan PAD dan juga mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Dari segi perkembangannya, Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah. Sumber daya alam yang melimpah ini dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian disektor pariwisata. Dengan berkembangnya sektor pariwisata ini dapat meningkatkan PAD. Salah satunya jumlah wisatawan nusantara maupun mancanegara dapat meningkat setiap tahunnya. Perkembangan yang diberikan pada sektor pariwisata dengan adanya kunjungan jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2014.



Sumber: Statistik Kepariwisata

Gambar 1.4
Perkembangan Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Nusantara
di D.I Yogyakarta Tahun 2011-2014

Dari gambar 1.4 diatas dapat dijelaskan bahwa perkembangan jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2014 mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2011 wisatawan mancanegara dan nusantara sebesar 1.607.694 orang dan pertumbuhan sebesar 10,34%, tahun 2012 sebesar 2.360.173 orang dan pertumbuhan sebesar 46,80%, tahun 2013 sebesar 2.837.967 dan pertumbuhan sebesar 20,24%, tahun 2014 sebesar 3.346.180 dan pertumbuhan sebesar 17,91%. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah, semakin banyak wisatawan mancanegara dan nusantara yang berkunjung ke obyek-obyek wisata maka akan meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu daerah pada suatu periode tertentu. Produk Domestik Regional Bruto didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan disuatu daerah pada suatu periode tertentu (BPS,2014). Pada tabel di bawah ini merupakan perkembangan PDRB atas dasar harga konstan 2000 di Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2012-2014.

Tabel 1.5
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2012-2014
per Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta

Kabupaten/Kota	2012	2013	2014
Kota Yogyakarta	6.151.679	6.486.790	6.830.589
Sleman	7.069.229	7.471.898	7.876.124
Bantul	4.400.313	4.645.476	4.920.952
Kulonprogo	1.963.078	2.062.182	2.132.296
Gunungkidul	3.642.562	3.830.400	4.004.300

Sumber: BPS D.I Yogyakarta (diolah)

Dari tabel 1.5 perkembangan PDRB atas dasar harga konstan 2000 pada tahun 2012-2014 mengalami peningkatan. Penerima sumbangan PDRB terbesar berada di Kabupaten Sleman tahun 2014 sebesar 7.876.124, sedangkan Kabupaten Kulonprogo tahun 2014 memiliki nilai terendah sebesar 2.132.296. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor mulai dari luas wilayah, sumberdaya alam serta potensi disetiap daerahnya masing-masing. Simanjuntak dalam Halim (2001), mengemukakan jika suatu daerah dapat mengelola sumber daya alam yang dimiliki dan perekonomiannya berkembang

dengan baik maka PDRB akan meningkat yang memperkuat PAD suatu daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dilihat bahwa terdapat keterkaitan antara pajak daerah, jumlah wisatawan dan PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, disini penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai *“Pengaruh Pajak Daerah, Jumlah Wisatawan dan PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007-2014”*.

B. Batasan Masalah

Salah satu indikator untuk mengukur Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh suatu daerah yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain Pajak Daerah, Jumlah Wisatawan, PDRB. Berdasarkan latar belakang diatas terdapat beberapa keterbatasan yang dialami oleh peneliti dalam menyelesaikan peneliti ini diantaranya :

1. Obyek yang diteliti adalah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel dependen, sedangkan Pajak, Jumlah Wisatawan dan PDRB sebagai variabel independen.

C. Rumusan Masalah

Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta dari berbagai obyek yang akan diketahui. Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang telah diuraikan dapat dirumuskan menjadi:

1. Seberapa besar pengaruh Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2014.
2. Seberapa besar pengaruh Jumlah Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2014.
3. Seberapa besar pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2014.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang ada, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2014.
2. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2014.
3. Untuk mengetahui pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2014.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil kajian penelitian ini dimasa yang akan datang di Kabupaten/Kota Yogyakarta khususnya di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul dan di Indonesia pada umumnya sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Sebagai tolak ukur seberapa jauh pengetahuan dari penulis dalam melakukan penelitian selanjutnya.

2. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam menentukan kebijakan yang tepat guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.